



# MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : (021) 3843348, 3810350, 3457661 fax. (021) 3810361  
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Jakarta, 24 Mei 2023

Nomor : 06 /Pansel/Ad Hoc TPK/V/2023.  
Lampiran : 3 (tiga) lembar.  
Perihal : Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XX Tahun 2023.

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Tinggi  
(daftar nama terlampir)  
di –  
Seluruh Indonesia

Sehubungan akan dilaksanakannya Seleksi Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahap XX Tahun 2023 yang pelaksanaannya akan diselenggarakan secara serentak pada Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia (daftar terlampir), berkaitan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Membentuk Panitia Daerah Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor dengan susunan meliputi : Penanggung Jawab, Ketua Pelaksana, Sekretaris dan Anggota, berjumlah maksimal 9 (sembilan) orang, kemudian Surat Keputusan Panitia Daerah tersebut dikirim ke **Panitia Pusat Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor.**
2. Mengumumkan adanya seleksi kepada publik baik melalui papan pengumuman, website Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum masing-masing (pengumuman terlampir).
3. Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc Tipikor dilakukan secara online dan apabila ada Peserta yang menyerahkan berkas ke Pengadilan Tinggi tetapi belum melakukan pendaftaran secara online diharapkan Panitia Daerah dapat memberikan panduan pendaftaran online pada website <http://adhoc.mahkamahagung.go.id>.
4. Menerima dan meneliti berkas Lamaran beserta persyaratan dari Pelamar berdasarkan formulir yang telah disediakan Panitia Seleksi (formulir terlampir), berkas lamaran paling lambat diterima Panitia Daerah tanggal 22 Juni 2023 dan kemudian berkas lamaran Peserta dikirimkan kepada Panitia Pusat Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi dan dialamatkan ke Mahkamah Agung RI Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Tromol Pos 1020 Jakarta Pusat 10110 melalui Titipan Kilat dikirimkan paling lambat pada tanggal 23 Juni 2023.

**Lampiran :**

**Daftar Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia :**

1. Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
2. Pengadilan Tinggi Medan.
3. Pengadilan Tinggi Padang.
4. Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
5. Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.
6. Pengadilan Tinggi Jambi.
7. Pengadilan Tinggi Palembang.
8. Pengadilan Tinggi Bengkulu.
9. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
10. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.
11. Pengadilan Tinggi Banten.
12. Pengadilan Tinggi Jakarta.
13. Pengadilan Tinggi Bandung.
14. Pengadilan Tinggi Semarang.
15. Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
16. Pengadilan Tinggi Surabaya.
17. Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
18. Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
19. Pengadilan Tinggi Pontianak.
20. Pengadilan Tinggi Samarinda.
21. Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.
22. Pengadilan Tinggi Makassar.
23. Pengadilan Tinggi Palu.
24. Pengadilan Tinggi Kendari.
25. Pengadilan Tinggi Manado.
26. Pengadilan Tinggi Gorontalo.
27. Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat.
28. Pengadilan Tinggi Denpasar.
29. Pengadilan Tinggi Mataram.
30. Pengadilan Tinggi Kupang.
31. Pengadilan Tinggi Ambon.
32. Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
33. Pengadilan Tinggi Jayapura.
34. Pengadilan Tinggi Papua Barat.



5. Mempersiapkan pelaksanaan ujian tertulis di Pengadilan Tinggi yang akan ditentukan kemudian setelah dilihat jumlah peserta yang mendaftar.
6. Untuk kelancaran pelaksanaan seleksi apabila ada ketentuan yang belum jelas, Panitia Daerah dapat menghubungi :
  - Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI, Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum selaku Sekretaris Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XX Tahun 2023, HP. 085213565838.
  - M.E.R. Herki Artani Richmiani, SH., MH. selaku Sekretariat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XX Tahun 2023, HP. 081319560882.
  - Fajar Andriansyah, ST. Informasi tentang sistem dan pendaftaran online HP. 085649569898.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**KETUA KAMAR PIDANA  
SELAKU KETUA PANITIA,  
DR. SUHADI, SH. MH.**

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI (sebagai laporan).
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

**KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF  
SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI TAHAP XX TAHUN 2023**

NAMA PELAMAR : .....

NOMOR BERKAS : .....

TANGGAL TERIMA BERKAS : .....

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Surat lamaran untuk menjadi Calon Hakim <i>Ad Hoc</i> yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung dan ditandatangani oleh Pelamar.   | <input type="checkbox"/> |
| 2. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang.  | <input type="checkbox"/> |
| 3. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah.  | <input type="checkbox"/> |
| 4. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Pemerintah.   | <input type="checkbox"/> |
| 5. Surat Keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri setempat.  | <input type="checkbox"/> |
| 6. Surat Kelakuan Baik/SKCK dari Kepolisian yang masih berlaku.  | <input type="checkbox"/> |
| 7. Surat pernyataan tidak menjadi anggota salah satu partai politik di atas kertas bermaterai Rp.10.000,00.  | <input type="checkbox"/> |
| 8. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim <i>Ad Hoc</i> di atas kertas bermaterai Rp.10.000,00.   | <input type="checkbox"/> |
| 9. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermaterai Rp.10.000,00.  | <input type="checkbox"/> |
| 10. Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.   | <input type="checkbox"/> |
| 11. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim <i>Ad Hoc</i> sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,00. | <input type="checkbox"/> |
| 12. Pas foto terbaru ukuran 4x6 berwarna sebanyak 4 (enam) lembar.   | <input type="checkbox"/> |
| 13. Fotokopi KTP.  | <input type="checkbox"/> |
| 14. Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir.  | <input type="checkbox"/> |
| 15. Daftar Riwayat Hidup lengkap/Riwayat pekerjaan lengkap secara terinci yang ditandatangani oleh pelamar.  | <input type="checkbox"/> |

KETERANGAN :	TTD & NAMA PEMERIKSA BERKAS
	(.....)

Catatan:

\* Coret yang tidak perlu

**Berkas disusun berdasarkan urutan Kelengkapan Persyaratan Administratif.**



**PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XX  
TAHUN 2023**

## PENGUMUMAN

**PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA TAHAP XX  
NOMOR: 05/Pansel/Ad Hoc TPK/V/2023**

Panitia Seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2023 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
4. Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang Hukum (antara lain : Hukum Keuangan dan Perbankan, Hukum Administrasi, Hukum Pertanahan, Hukum Pasar Modal dan Hukum Pajak) sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
5. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia;
9. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
10. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
11. Melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ;
12. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi;
13. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi;
14. Izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
15. Bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia.

Pendaftaran dilakukan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat lamaran untuk menjadi Calon Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan ditandatangani oleh pelamar;
- b. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir asli oleh pejabat berwenang;
- c. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
- d. Surat keterangan bebas narkoba yang dilampiri hasil pemeriksaan laboratorium dari rumah sakit pemerintah;
- e. Surat Keterangan tidak pernah dihukum dari Pengadilan Negeri setempat;
- f. Surat Kelakuan Baik/SKCK dari Kepolisian yang masih berlaku;
- g. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota salah satu partai politik di atas kertas bermeterai Rp.10.000,00;
- h. Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *Ad Hoc* di atas kertas bermeterai Rp. 10.000,00;
- i. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia di atas kertas bermeterai Rp.10.000,00;
- j. Surat izin tertulis dari atasan langsung/atasan yang berwenang bagi pelamar yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- k. Surat pernyataan bersedia mengganti biaya seleksi dan pendidikan apabila mengundurkan diri sebagai Hakim *Ad Hoc* sebesar nilai yang ditetapkan oleh Panitia di atas kertas bermeterai Rp. 10.000,00;
- l. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 (empat) lembar;
- m. Fotokopi KTP;
- n. Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
- o. Daftar Riwayat Hidup lengkap/riwayat pekerjaan lengkap secara terinci selama 15 (lima belas) tahun dibidang hukum yang ditandatangani oleh pelamar;
- p. Bukti telah melaporkan harta kekayaan dapat diserahkan setelah lulus ujian tertulis / pada saat ujian lisan.

**Catatan :**

1. Peserta yang pernah mengikuti seleksi Tahap XIX Tahun 2023 dan dinyatakan lulus administrasi, tidak perlu melengkapi persyaratan (kecuali surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan Pas Foto).
2. Pendaftaran dilakukan secara online melalui <http://adhoc.mahkamahagung.go.id> mulai tanggal 23 Mei 2023 s/d 22 Juni 2023.
3. Peserta yang telah melakukan pendaftaran online diwajibkan untuk mengirimkan seluruh persyaratan administrasi yang dimasukkan dalam amplop tertutup warna coklat polos dan diserahkan kepada Panitia Daerah di Pengadilan Tinggi sesuai pendaftaran dengan mencantumkan Nomor Telepon/HP pada sudut kanan atas Surat Permohonan maupun pada Amplop Surat. Berkas sudah diterima Panitia Daerah paling lambat tanggal 22 Juni 2023.
4. Pengumuman kelulusan administrasi, ujian tertulis dan tahap seleksi selanjutnya dapat dilihat pada website Mahkamah Agung [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) dan Media Sosial Mahkamah Agung.
5. Seleksi tertulis, Profile Assessment dan Wawancara, tempat dan waktu penyelenggaraan akan ditentukan kemudian.
6. Dalam ujian seleksi tertulis diperkenankan untuk membuka buku (*Open Book*).

Jakarta, 23 Mei 2023

PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XX TAHUN 2023

Ketua,  
ttd.  
Dr. H. SUHADI, SH., MH.

Sekretaris,  
ttd.  
Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.